

## Menghapus Dendam Kepada Soeharto Tak Segampang Permintaan Megawati

Justru disinilah KESALAHAN FATAL Megawati! Bagaimana mungkin menghapus dendam kepada Soeharto, selama dosa-dosanya, membantai jutaan rakyat tidak berdosa, memenjarakan ratusan ribu orang TANPA proses pengadilan yang sah dan adil, memberlakukan DOSA-TURUNAN yang mengakibatkan belasan juta keluarga TAPOL hidup tersisihkan dalam masyarakat, ... itu BELUM juga diakui dan dipertanggungjawabkan Pemerintah yang berkuasa???

Tanpa ada kejelasan dan kejernihan melihat jenderal Suharto bisa naik takhta kekuasaan Pemerintah setelah lebih dahulu melakukan pengejaran, penangkapan dan pembantaian terhadap warga yang dituduh komunis, simpatisan dan Soekarnoisme dan semua dilakukan TANPA PROSES HUKUM yang sah dan adil! Setelah gebuk dan bubarkan PKI dan semua organisasi yang dituduh berafiliasi dengan PKI, lalu menangkap 15 Menteri Kabinet-Dwikora, diikuti dengan menggantikan semua anggota MPRS yg dituduh komunis dan Soekarnoisme dengan begundal-begundalnya, ... diputuskanlah TAP MPRS No.33/1967 yang menjadikan Proklamator Presiden Soekarno sebagai PESAKITAN, terlibat G30S dan pendukung PKI! Presiden Soekarno dicopot dan diganti oleh jenderal Soeharto, pejabat Presiden RI. Sejak itu Presiden Soekarno menjadi tawanan, ... sampai meninggal! Bagaimana mungkin dosa-dosa PELANGGARAN HAM-BERAT macam ini bisa dibiarkan lewat begitu saja seperti tidak pernah terjadi apa-apa dinegeri ini???

Dan orang yang PALING BERTANGGUNGJAWAB ketika itu, jenderal Suharto masih juga ada yang hendak menobatkan jadi pahlawan nasional???

Bagaimana pula, ... masih bisa menuntut orang jangan lagi menghujat Suharto???

Salam,  
ChanCT



Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Megawati Soekarnoputri berbicara

dalam acara Bu Mega Bercerita di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta,  
Senin (7/1/2019). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Oleh: Felix Nathaniel - 8 Januari 2019

<https://tirto.id/menghapus-dendam-kepada-soeharto-tak-segampang-permintaan-megawati-ddHB>

***Megawati Soekarnoputri tak ingin ada lagi kader PDIP yang menghujat Soeharto. Tapi itu tak mudah karena ada faktor sejarah.***

[tirto.id](https://tirto.id) - Megawati Soekarnoputri berharap masyarakat menghentikan segala hujatan kepada Soeharto. Putri presiden Sukarno ini menilai pemimpin negara seharusnya dihormati masyarakat, bahkan ketika telah meninggal sekalipun.

"Waktu ayah saya dijatuhkan dengan cara, yang menurut saya tidak beretika, saya bilang jangan hujat Pak Harto," kata Megawati di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (7/1/2019). Megawati adalah Ketua Umum PDI Perjuangan selama 25 tahun terakhir.

Permintaan Megawati ini bertolak belakang dengan sikap banyak kader PDIP. Apabila enggan disebut menghujat, kader PDIP setidaknya kerap melontarkan kritik ke Soeharto selama ia memimpin Indonesia selama 32 tahun. Kritik makin kerap kita dengar terutama ketika masa-masa kampanye pilpres seperti sekarang.

Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah misalnya, menyatakan Soeharto—bekas mertua Prabowo Subianto—adalah [mahaguru korupsi](#). "Guru dari korupsi Indonesia sesuai TAP MPR Nomor XI tahun '98 itu mantan presiden Soeharto," kata Basarah di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2018).

Dia enggan menarik ucapannya meski dikritik kubu oposisi. Dia bahkan telah dilaporkan ke polisi, meski belum dijadikan tersangka hingga saat ini.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto juga tak jauh beda. Dia membela Basarah. Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin ini mengatakan merindukan Soeharto sama saja dengan rindu kepada korupsi dan nepotisme.

"Merindukan zaman Pak Harto itu berarti merindukan KKN, merindukan kolusi, merindukan korupsi, dan nepotisme," [ujar Hasto](#) di bilangan Jalan Gajah Mada, Jakarta, Jumat (23/11/2018).

Baca juga: [Politik Soeharto Menggembosi Megawati Berujung Kerusuhan 27 Juli 96](#)

Hasto bahkan mengatakan kebijakan pada zaman Orde Baru hanya dinikmati segelintir orang saja. Segelintir orang tersebut, tuding Hasto, adalah keluarga Soeharto itu sendiri. "Lihat saja hartanya. Wajar kalau kroni Pak Harto mengkampanyekan agar itu kembali, karena mereka menikmati *privilege* luar biasa."

Hasto merasa keluarga Soeharto harusnya bertanggung jawab atas persoalan yang muncul sejak 1998 hingga sekarang. "Ketidakadilan yang muncul akibat salah urus selama pemerintahan Soeharto," tegasnya.

Megawati sendiri bukannya tak mengkritik Soeharto. Pada kesempatan yang sama ketika bicara kalau masyarakat tak perlu lagi menghujat Soeharto, ia mengatakan bahwa faktanya era Soeharto—yang dikenal dengan sebutan Orde Baru—kehidupan sosial politik lebih buruk daripada era reformasi.

Pada era itu, misalnya, orang tak bebas berpendapat. "Itu, kan [Orde Baru], enggak bisa seperti sekarang. Zaman segitu kita tahu seperti apa. Pembungkaman orang itu," katanya.

### **Tak Mudah**

Sejarawan sekaligus Editor Pelaksana Jurnal *Masyarakat Sejarawan Indonesia*, Andi Achdian menilai wajar belaka Megawati menganjurkan Soeharto tak lagi dihujat. Bagi Andi, Megawati memang harus begitu agar berkontribusi menciptakan situasi pemilu dan pemerintahan yang tenang.

Masalahnya, apa yang diinginkan Megawati belum tentu ditaati bawahannya.

"Megawati hanya bisa mengeluarkan komentar yang sifatnya netral sebagai elite politik," kata Andi kepada reporter *Tirto*, Selasa (8/1/2019). "Tapi yang masalah adalah meredam kebencian di akar rumput ini."

Baca juga: [Kerinduan Zaman Orde Baru Dipertanyakan PDIP](#)

Andi mengatakan, wajar jika pendukung Sukarno benci Soeharto. Ini berdasarkan keyakinan bahwa Sukarno digantikan secara inkonstitusional oleh Soeharto. Faktor sejarah ini yang membuat permintaan Megawati sulit terlaksana.

"Sentimen itu tetap bertahan lama. Jadi kalau para Sukarno, pasti mereka tetap punya sentimen anti-Soeharto dengan klaim-klaim historis bahwa dia [Soeharto] mengambil alih kekuasaan dengan cara tidak wajar dan perlakuan terhadap Sukarno yang tidak baik,"

terangnya.

Soeharto mulai menggantikan peran Sukarno sejak memegang Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar. Dengan dasar surat itu, Soeharto membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI), sesuatu yang tak dikehendaki Sukarno.

"Padahal, kan, ada dalam pidato Sukarno itu bahwa Supersemar bukan surat untuk pergantian kekuasaan, tapi surat perintah," kata Andi.

Baca juga artikel terkait [SEJARAH INDONESIA](#) atau tulisan menarik lainnya [Felix Nathaniel](#) (tirta.id - Politik)

Reporter: Felix Nathaniel

Penulis: Felix Nathaniel

Editor: Rio Apinino

“Yang masalah adalah meredam kebencian di akar rumput.”